

PROYEK PERUBAHAN

SIAP PAK

Akselerasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan melalui Virtual Account secara Kolektif

PKN TK II
ANGKATAN XXXVII
BPSDMD PROV
SUMSEL



HERLIANSYAH HILALUDDIN, S.STP., M.SI

Project Leader Proyek Perubahan

PROYEK PERUBAHAN

**AKSELERASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MELALUI VIRTUAL ACCOUNT SECARA KOLEKTIF**

COACH Srie Agustine, ME

TIM PENYUSUN

MENTOR M. Refly MS, S.Sos, MM.

Project Leader Herliansyah, S.STP., M.Si

Tim Efektif M Putra Taufan, ST, M.Si.M

Riko Abot, SP, M.Si

Maya Nirwana, SE, M.Si

Ahmad Fajri, SE

August Putra Ekananda, S.STP, M.Si

Karina Deriska, A.Md.A.Pj

Mutiara Dwi Faiska, SE

Winda Novita, S. Tr. IP

Yunita Rohali, S.Ak



Berikut Kode IPP Herliansyah, S.STP, M.Si
NDH 38



<http://bit.ly/41ZrrRf>

APRESIASI DAN DUKUNGAN



Ir. Asmar Wijaya, M. Si
Pj. Bupati Ogan Komering Ilir



Achmad Syamsudin
Direktur Utama Bank Sumsel Babel



M. Refly MS, S.Sos, M.M
Mentor



Prof.Dr. HM. Edwar Juliarta, Sos,MM.
Kepala BPSDMD Prov Sumsel



"Meningkatkan efektivitas pajak berarti memastikan keadilan, transparansi, dan manfaat nyata bagi pembangunan masyarakat"



PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Proyek Perubahan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan ini berjudul "SIAP PAK: Akselerasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan melalui Virtual Account secara Kolektif", yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelayanan perpajakan dan inovasi di bidang pajak daerah.

Terima kasih diucapkan kepada:

1. Muhammad Refly MS, S.Sos., MM Sekda Kab. OKI Selaku Mentor;
2. Prof.Dr. HM. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M selaku Plh. Kepala BPSDMD Prov Sumsel;
3. Srie Agustina, SE, ME Selaku coach
4. Segenap Penguji, Narasumber dan Widyaiswara;
5. Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun Proper ini; dan
6. Rekan-rekan BPPD Kab OKI dan rekan-rekan peserta PKN PKN TK II Angkatan XXXVII Prov. Sumsel.

Project Leader,

Herliansyah, S.STP., M.Si
NDH. 38/PKN II /XXXVII/2024



DAFTAR ISI

- 1 PENDAHULUAN
- 2 RANCANGAN PROPER
- 3 STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH
- 4 PENTAHAPAN PROPER
- 5 IMPELEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
- 18 KETERKAITAN MATA PELATIHAN
- 19 CAPAIAN DUKUNGAN KEPENTINGAN
- 24 IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
- 25 KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN
- 26 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR
- 27 KETERKAITAN MATA PELATIHAN
- 28 PENUTUP

LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi, setiap daerah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dituntut untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kabupaten OKI, yang merupakan kabupaten terluas di Sumatera Selatan dengan luas 17.071 km² dan jumlah penduduk sekitar 779.893 jiwa, menghadapi tantangan dalam mengelola potensi wilayah yang terdiri dari rawa, daratan, sungai, pantai, dan laut.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI selaku OPD yang bertugas mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang secara khusus bersumber dari pajak daerah mengelola 11 Pajak Daerah. Salah satu Pajak yang dikelola yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan Pajak yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga membutuhkan suatu prosedur pengelolaan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

TAHUN	2023								
	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	16.500.000.000	184.964.213	1,12%	1.369.810.516	8,30%	13.523.980.446	81,96%	18.128.219.856	109,87%
2022	35.581.425.352	227.788.905	0,64%	1.598.891.031	4,49%	22.596.363.219	63,51%	23.739.490.984	66,72%
2023	24.000.000.000	445.524.677	1,86%	1.335.072.444	5,56%	17.868.607.684	74,45%	24.851.227.282	103,55%

Dari data diatas dapat dilihat Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2021-2023 belum mencapai target hingga triwulan IV, sementara batas akhir pembayaran jatuh tempo pada akhir triwulan III. Kendala utama meliputi luasnya wilayah yang menyulitkan penghimpunan pembayaran secara manual oleh perangkat desa, yang memakan waktu, rawan kerusakan, dan berisiko human error serta kecurangan. Proses input data pembayaran yang memakan waktu lama juga meningkatkan potensi kesalahan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pembayaran yang lebih efisien, seperti penggunaan Virtual Account secara kolektif, yang memungkinkan perangkat desa untuk menghimpun dan membayar PBB-P2 sekaligus melalui mobile banking, tanpa harus datang ke payment point BPPD. Sistem ini memudahkan monitoring pembayaran secara real-time oleh masyarakat, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengakselerasi penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

RANCANGAN PROPER

ANALISIS MASALAH

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menghadapi masalah dalam pengelolaan dan pemantauan pajak yang efektif, serta risiko kecurangan oleh sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan pembayaran pajak. Proses pengelolaan dokumen pembayaran secara manual juga rawan kesalahan dan memakan waktu.

Kendala utama disebabkan oleh cakupan wilayah yang luas, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dan ketergantungan pada metode manual. Hal ini menghambat optimalisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang seharusnya menjadi sumber pendapatan penting untuk pembangunan daerah.

Dampak dari masalah ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal, sehingga menghambat pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan solusi berbasis sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, dalam memecahkan permasalahan ini, dibuatlah menggunakan Analisa Causal Map sebagai berikut :

GEJALA MASALAH / ISU	SEBAB- SEBAB MASALAH	SEBAB UTAMA (AKAR MASALAH)	ALTERNATIF SOLUSI	SOLUSI TERPILIH
Belum Efektif dan Efisien Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Ogan Komering Ilir	Adanya Fraud (kecurangan) oleh petugas payment point		Pelaksanaan perputaran (turnover) pegawai secara berkala oleh pihak ketiga	
	Kesulitan akses antar wilayah	Wajib Pajak kesulitan mendapatkan akses dan informasi terkait pembayaran pajak daerah	Menerapkan sistem pembayaran Collective Virtual Account, dimana pembayaran akan dilakukan secara kolektif dalam hal ini akan bekerja sama dengan Kepala Desa/Camat setempat yang kemudian akan dibayarkan oleh Kepala Desa/Camat tersebut.	Menerapkan sistem pembayaran Collective Virtual Account
	Keterbatasan kemampuan SDM dalam penerapan teknologi		Sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan teknologi khususnya dalam pelayanan pajak daerah	

Berdasarkan analisis casual map, pendapatan PBB-P2 yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, dengan penyebab utama adalah luasnya cakupan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menyulitkan Wajib Pajak dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran.

Sebagai solusi, diusulkan penerapan sistem pembayaran Virtual Account secara Kolektif dengan melibatkan Kepala Desa dan Camat setempat. Saat ini, proses pembayaran PBB-P2 masih dilakukan secara manual, di mana masyarakat menyerahkan SPPT dan pembayaran kepada perangkat desa, yang kemudian mengumpulkan dokumen fisik untuk dibawa ke Payment Point BPPD.

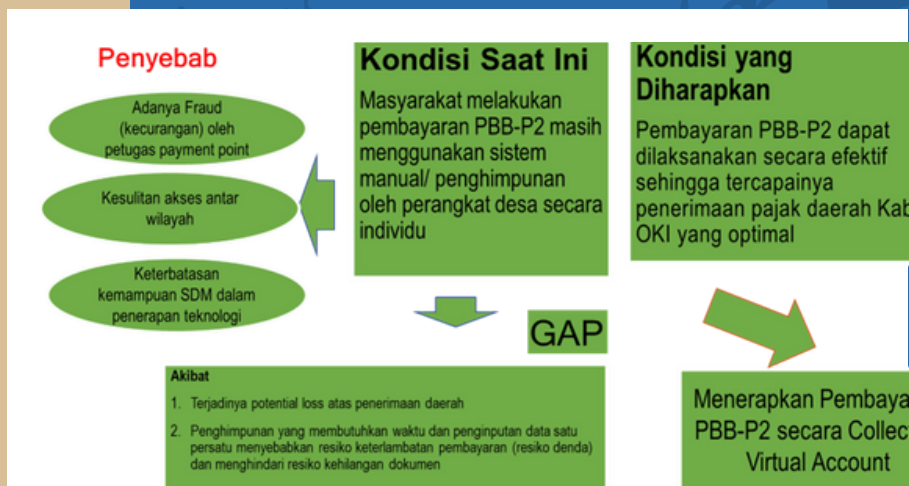
Proses ini memakan waktu lama, berisiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta berisiko kesalahan atau kecurangan dalam penginputan data pembayaran oleh petugas bank. Proses ini juga dapat berlangsung lebih dari satu hari sebelum Wajib Pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2.

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif mulai terlaksana pada Oktober 2024 diawali dengan tahapan persiapan, dengan melaporkan ide ini kepada Sekretaris Daerah selaku mentor. Diikuti dengan rapat-rapat dimulai rapat internal Badan Pengelola Pajak Daerah OKI untuk mendapatkan masukan dari staf, kepala sub bagian, kepala bidang dan sekretaris tentang bagaimana Program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif ini dikemas dan dirumuskan agar benar-benar bisa efektif dilaksanakan.

Proses pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif dimulai wajib pajak atau masyarakat desa menitipkan/ menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pembayaran PBB-P2 kepada perangkat desa. Perangkat desa menginput data pembayaran PBB-P2 melalui esppt.kaboki.go.id. setelah melakukan proses penginputan dan akan muncul nomor virtual account kolektif. Selanjutnya, proses pembayaran dapat dilakukan perangkat desa melalui mobile banking atau payment point secara kolektif atau sekaligus dengan satu nomor virtual account. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan, petugas desa maupun wajib pajak dapat melihat bukti bayar secara real-time melalui esppt.kaboki.go.id. Untuk bukti lunas dari esppt.kaboki.go.id dapat disertai dengan stempel kepala desa Alur proses pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara kolektif.

Berdasarkan analisis masalah yang dimulai dari identifikasi masalah isu strategis, kemudian dilakukan analisis isu strategis dengan pendekatan analisis Casual Map, maka rencana strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul adalah **“Akselerasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Virtual Account secara Kolektif”**.



PENTAHAPAN PROPER

- ***Rencana Aksi Jangka Pendek***

Program jangka pendek akan dicapai dalam kurun waktu 2 bulan, memadukan hasil pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan pengelolaan organisasi, dimulai dari konsultasi kepada Mentor untuk menentukan persetujuan atas inovasi proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan dikuatkan dengan disusunnya Tim Pelaksana Proyek Perubahan, pelaksanaan kolaborasi, bimbingan dan Pelayanan kepada Masyarakat, pelaksanaan pengembangan sistem Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara kolektif, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi (monev).



- ***Rencana Aksi Jangka Menengah***

Program jangka menengah akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 6 s.d 12 bulan. Pelaksanaan program jangka menengah memanfaatkan program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif dengan terus mendorong semua stakeholder mengimplementasikan, evaluasi pelaksanaan dalam memperkuat program, rapat koordinasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- ***Rencana Aksi Jangka Panjang***

Program jangka panjang akan ditempuh kurang lebih 12 bulan, sebagai kelanjutan dari program jangka pendek dan menengah. Pada program jangka Panjang ini yang akan dicapai Memantapkan Program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif, untuk tetap berjalan dan menjadi familiar bagi masyarakat.





IMPLEMENTASI PROPER

1

Melakukan Konsultasi dengan Mentor

Pelaksanaan konsultasi bersama mentor dilaksanakan pada minggu ke tiga Oktober 2024 untuk membahas terkait proyek perubahan yang akan dijalankan. Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksananya konsultasi dengan mentor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana proses konsultasi dapat dilakukan secara baik, serta mendapatkan dukungan, arahan atau langkah-langkah yang akan diambil dalam implementasi aksi perubahan ini.



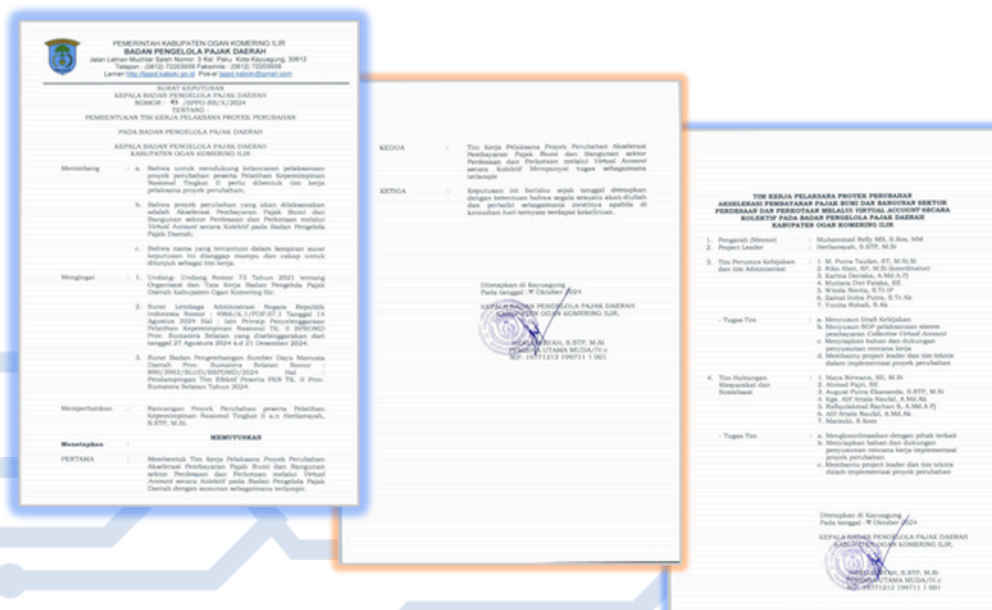
Rapat Pembagian Tugas Tim Efektif dan Menyiapkan Bahan, Data Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Penyusunan Proyek Perubahan

2



Pelaksanaan rapat pembagian tugas tim dan penyusunan bahan serta data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan dilaksanakan pada Minggu ke tiga bulan Oktober 2024.

Rapat ini bertujuan untuk pembagian tugas tim dalam menyiapkan bahan dan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan proyek perubahan



3

Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Stakeholder Terkait Pengembangan Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account Kolektif

Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober 2024. Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait pengembangan Virtual Account (VA) untuk pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan terciptanya sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

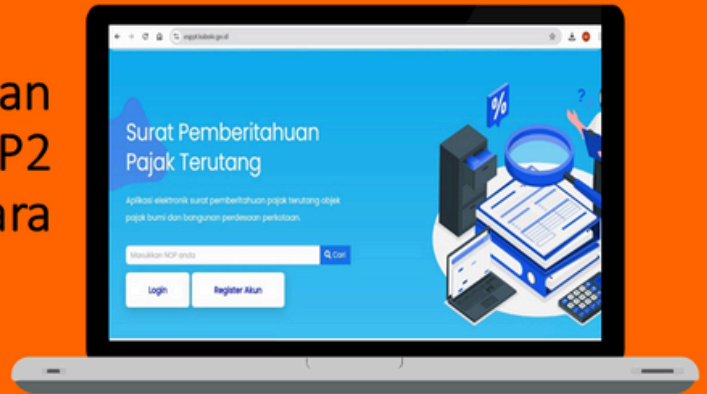


Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan terciptanya sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak. Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dipermudah, kesalahan administrasi dapat diminimalkan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

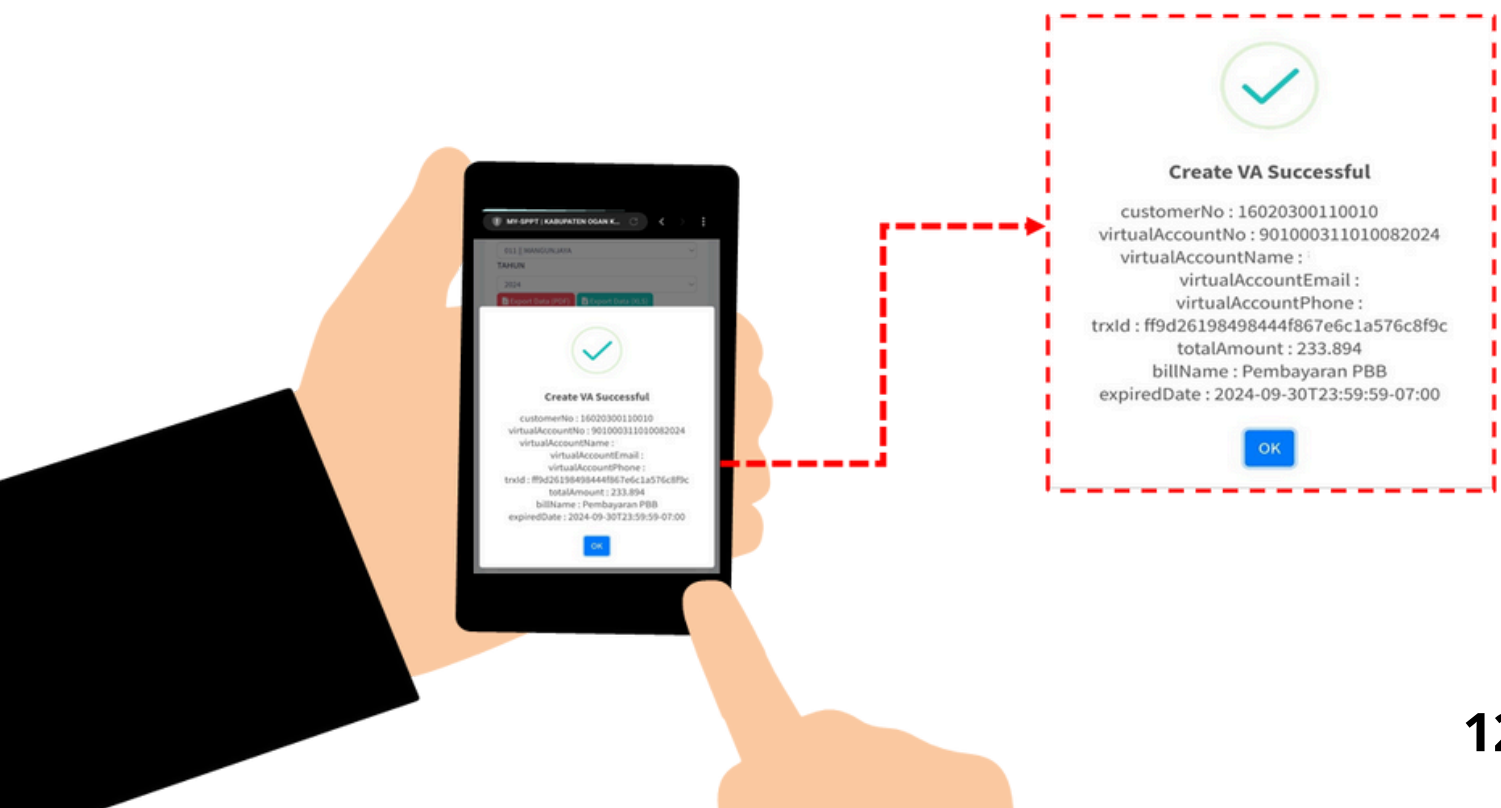
Selain itu, koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat implementasi sistem Virtual Account (VA) guna memperluas jangkauan layanan dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran, sekaligus mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah yang optimal.

Milestones 4

Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif



Pengembangan sistem pembayaran PBB-P2 dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu keempat bulan November 2024. Kegiatan ini Pelaksanaan pengembangan sistem pembayaran PBB-P2 menggunakan situs website espt.kaboki.go.id sebagai media untuk memperoleh nomor Virtual Account yang nantinya akan diintegrasikan dengan data Bank Sumsel Babel, sehingga pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif.





5

Pelaksanaan Tes Operasional VA PBB-P2 Secara Kolektif Bersama Stakeholder Terkait

Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu keempat November 2024 bertujuan untuk memastikan kanal pembayaran VA PBB-P2 berjalan secara optimal, aman, dan efektif, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan memastikan kanal pembayaran siap untuk digunakan dan diterapkan





Pelaksanaan Sosialisasi ke Pegawai BPPD Terkait SOP Pembayaran VA PBB-P2 Secara Kolektif

Pelaksanaan sosialisasi ke pegawai BPPD terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Virtual Account PBB-P2 secara Kolektif dilaksanakan pada minggu keempat bulan November 2024.



Kegiatan sosialisasi di lingkup internal Badan Pengelola Pajak Daerah dihadiri oleh seluruh pegawai BPPD Kab. OKI baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pemahaman teknis cara penggunaan VA PBB-P2 secara kolektif.



Rapat Persiapan Launching Pembayaran PBB-P2 Melalui Virtual Account Secara Kolektif

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas terkait pelaksanaan launching pembayaran PBB-P2 melalui virtual account secara kolektif dengan menghasilkan beberapa kesepakatan berupa :

- Kegiatan Launching Pembayaran PBB-P2 Melalui Virtual Account Secara Kolektif akan dilakukan bersamaan dengan acara Bulan Bhakti Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada awal Desember tahun 2024 dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, wajib pajak aktif dan stakeholder terkait yaitu Bank Sumsel Babel.
- Koordinator Pelaksanaan :
 1. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 2. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan
 3. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding.
- Tempat Pelaksanaan : Rumah Makan Sederhana, Kayuagung.





Pelaksanaan launching virtual account PBB-P2 secara kolektif. Kegiatan launching dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2024 di RM. Sederhana Kayuagung. Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account (VA) secara kolektif diresmikan langsung oleh Pj. Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Ir. Asmar Wijaya, M.Si. Kegiatan Lauching ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Forum Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir



Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan/ Controlling



Milestone ke 9 (sembilan) dalam proyek perubahan ini adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan/controlling. Kegiatan ini dilaksanakan minggu kedua Desember 2024 di Ruang Rapat Badan Pengelola Pajak Daerah.



Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring atau memantau pelaksanaan, mendeteksi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan proyek VA PBB-P2 secara kolektif dan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Monitoring dan evaluasi juga mendorong keterbukaan dan kolaborasi antar tim proyek, karena semua pihak dapat berkomunikasi mengenai kemajuan dan masalah yang dihadapi serta memperkuat kerja sama tim dalam mencapai tujuan.

10 Konsultasi dan Penyusunan Laporan Akhir

Pelaksanaan konsultasi bersama coach dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2024 secara online melalui zoom meeting untuk membahas penyusunan laporan akhir proyek perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta saran, arahan dan masukan serta pemantapan penyusunan laporan akhir kepada coach.



Milestones 11

Seminar Hasil

Milestone terakhir dalam proyek perubahan ini adalah seminar hasil . Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kegiatan ini diadakan guna memaparkan hasil dan implementasi dari proyek perubahan yang telah dikerjakan selama pendidikan dan pelatihan.



Jangka Menengah

Sosialisasi Pengoperasian Virtual Account Ke Perangkat Desa

Milestone ke 1 (satu) pada jangka menengah dalam proyek perubahan ini adalah sosialisasi pengoperasian virtual account ke perangkat desa.



Kegiatan ini dilaksanakan pada Desa Terate Kecamatan Sirih Pulau Padang dan secara bertahap pada tahun 2025 dilakukan di desa lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji coba pembayaran PBB-P2 secara kolektif dan sosialisasi berupa pengenalan dan edukasi perangkat desa terkait pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif.



Project Leader Telah Berhasil mengimplementasikan Beberapa Capaian di Milestones Jangka Menengah dalam Jangka Pendek Proyek Perubahan Ini.

Sosialisasi tentang penerapan Virtual Account secara Kolektif untuk akselerasi PBB-P2 ke Kabupaten/Kota Lainnya yang membutuhkan Solusi yang sama

Milestone ke 1 (satu) pada jangka panjang dalam proyek perubahan ini adalah sosialisasi tentang penerapan virtual account secara kolektif untuk akselerasi PBB-P2 ke Kabupaten/Kota lainnya yang membutuhkan solusi yang sama.



Kegiatan ini dilaksanakan berupa studi banding pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Bapenda Kota Bogor telah menerapkan beberapa opsi pembayaran digital seperti QRIS, mbanking, merchant online, dan VA namun belum menggunakan VA secara kolektif. Pada kegiatan ini adanya komunikasi terkait PBB-P2 melalui VA secara kolektif.



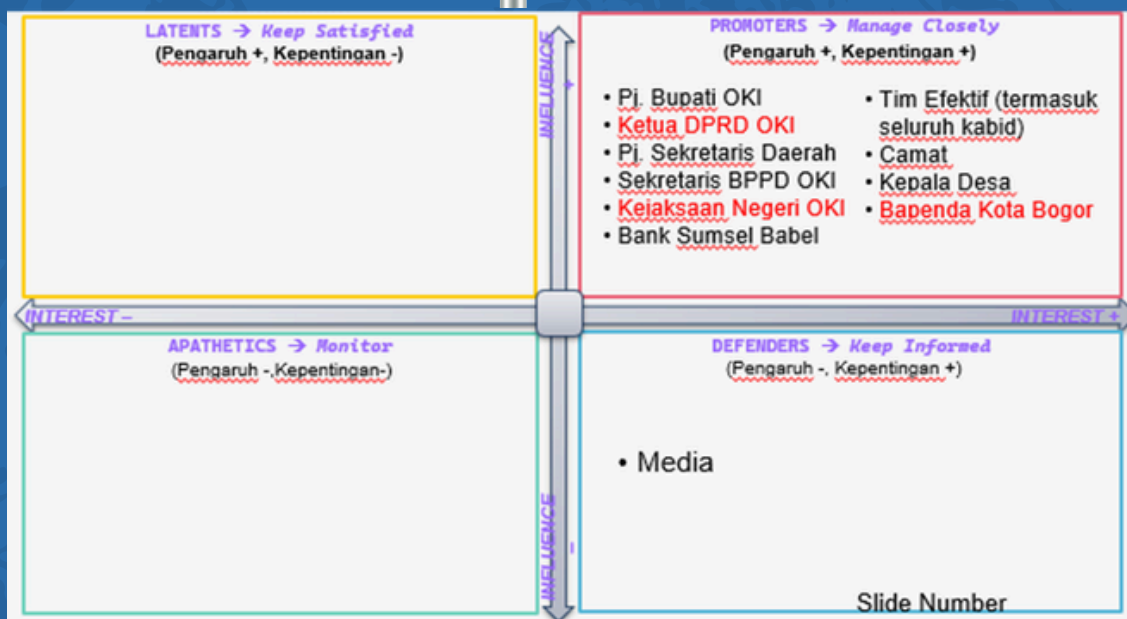
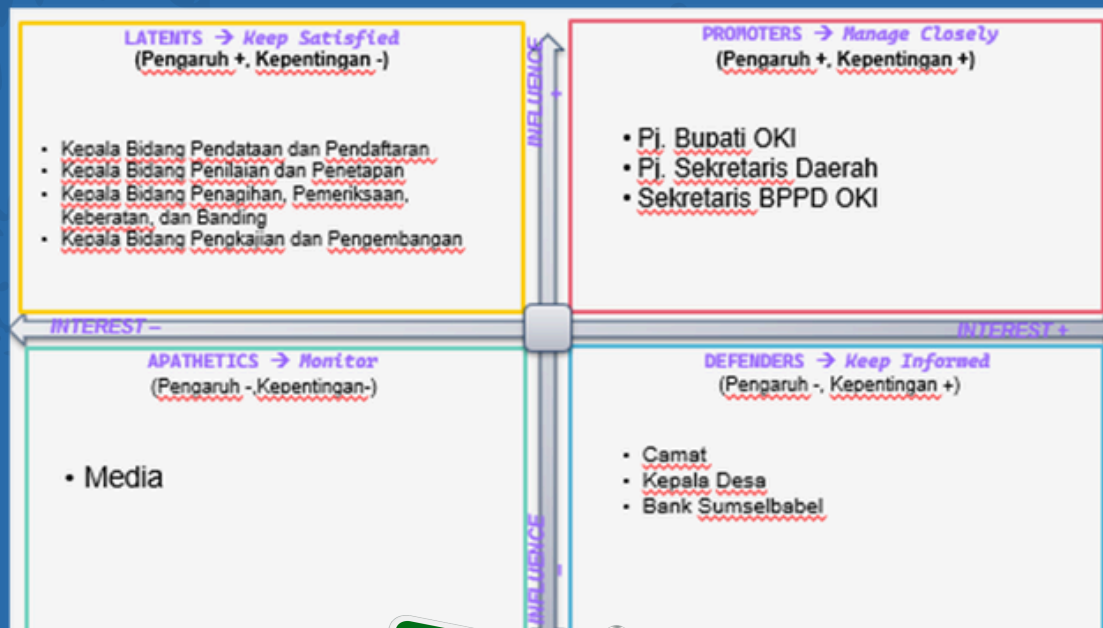
Project Leader Telah Berhasil mengimplementasikan Beberapa Capaian di Milestones Jangka Panjang dalam Jangka Pendek Proyek Perubahan Ini.



PUBLIKASI MEDIA ONLINE



CAPAIAN DUKUNGAN KEPENTINGAN



Slide Number

IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

No	Kuadran	Upaya Yang Dilakukan
1.	Promoters	a. Memanfaatkan dukungan yang diperoleh dari stakeholder untuk melaksanakan tahapan Proyek Perubahan SIAP PAK guna mencapai target capaian yang telah ditentukan b. Melakukan konsultasi dengan Pj. Bupati Ogan Komering Ilir dan P.j. Sekretaris Daerah dalam memperoleh petunjuk arahan kebijakan yang harus diambil pada setiap tahapan proyek perubahan. c. Membangun pola koordinasi dua arah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan d. Mendiskusikan dengan tim besar dan tim efektif dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi kendala dan hambatan proper
2.	Defenders	a. Melakukan komunikasi secara efektif dengan stakeholder terkait guna meyakinkan manfaat yang didapatkan dari terlaksananya proyek perubahan b. Melakukan pendekatan dan koordinasi secara baik guna melibatkan stakeholder dalam proses kegiatan c. Memberikan informasi secara continue dan up to date tentang Proyek Perubahan SIAP PAK yang dilakukan guna memperoleh dukungan
3.	Latents	a. Meyakinkan kepada stakeholder terkait adanya inovasi perubahan melalui proper ini bermanfaat besar bagi masyarakat b. Memberikan informasi secara continue tentang proyek perubahan yang dilaksanakan c. Melakukan pendekatan dan koordinasi secara baik guna melibatkan stakeholder dalam proses kegiatan d. Melakukan komunikasi dan interaksi yang baik dalam pelaksanaan proyek perubahan
4.	Apathetics	a. Memberikan pemahaman kebermanfaatannya Proyek Perubahan SIAP PAK kepada stakeholder dan masyarakat b. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang proyek perubahan c. Memberikan motivasi agar ikut berperan dalam mewujudkan kegiatan proyek perubahan

• Strategi Marketing 4P+1C

Strategi Marketing	Bentuk Marketing
Customer	Seluruh Penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Product	sistem pembayaran melalui Virtual Account Collective yang dapat menambah efisiensi dan efektivitas proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Price	⬆ APBD ⬆ Sumber lain yang sah.
Place	Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Promotion	Media sosial (media elektronik) dan media cetak
Branding	SIAP PAK (Akselerasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Virtual Account secara Kolektif)

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

No.	Kegiatan
Jangka Menengah	
1.	Memanfaatkan sistem pembayaran melalui Virtual Account secara Kolektif dengan terus mendorong semua stakeholder mengimplementasikan program sistem pembayaran melalui Virtual Account secara Kolektif di 18 kecamatan di Kabupaten OKI.
2.	Evaluasi pelaksanaan sistem pembayaran melalui Virtual Account secara Kolektif

No.	Kegiatan
Jangka Panjang	
1.	Sosialisasi tentang penerapan Virtual Account secara Kolektif untuk akselerasi pendapatan PBB-P2 ke kabupaten/kota lainnya yang membutuhkan Solusi yang sama
2.	Replikasi sistem pembayaran melalui Virtual Account secara Kolektif yang dapat menambah efisiensi dan efektivitas proses pembayaran PBB-P2 di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Solusi yang sama

Project Leader Telah Berhasil mengimplementasikan Beberapa Capaian di Milestones Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam Jangka Pendek Proyek Perubahan Ini.



Telah dilakukan Sosialisasi dan Uji Coba perdana pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif di Desa Terate, Kec. SP Padang



Melakukan sosialisasi terkait inovasi penerapan sistem pembayaran PBB-P2 secara kolektif melalui Virtual Account

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KEBERLANJUTAN PELAKSANAAN PROPER

LAN RI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN
XXXVII TAHUN 2024**

1. Peserta Pelatihan
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herliansyah, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI

2. Pejabat Pembina Kepegawaian
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Asmar Wijaya, M.Si
Jabatan : Penjabat Bupati
Instansi : Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII tahun 2024 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka pendek yaitu dibulan Oktober sampai Desember tahun 2024, jangka menengah yaitu dimulai bulan Januari 2025 sampai Juni 2025, dan jangka panjang mulai bulan Juni 2025 sampai Desember 2025.

Kayuagung, 09 Desember 2024
Disetujui oleh:
Mentor,
Herliansyah, S.STP, M.Si
NIP. 19771212 199711 1 001

Ir. Asmar Wijaya, M.Si
NIP. 19670717 199603 1 001

LAN RI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN
XXXVII TAHUN 2024**

1. Peserta Pelatihan
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herliansyah, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI

2. Pejabat Pembina Kepegawaian
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Refly MS, S.Sos., M.M
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII tahun 2024 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka pendek yaitu dibulan Oktober sampai Desember tahun 2024, jangka menengah yaitu dimulai bulan Januari 2025 sampai Juni 2025, dan jangka panjang mulai bulan Juni 2025 sampai Desember 2025.

Kayuagung, 09 Desember 2024
Disetujui oleh:
Mentor,
Herliansyah, S.STP, M.Si
NIP. 19771212 199711 1 001

Muhammad Refly MS S.Sos., M.M
NIP. 196903091988101001

PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Pengembangan Kompetensi– Stakeholder



Rapat-rapat koordinasi pelaksanaan program inovasi kepada PJ Bupati dan seluruh OPD di Kab. OKI

Pengembangan Kompetensi – Tim Efektif



Studi Banding ke Bapenda Kota Bogor yang telah menerapkan beberapa opsi pembayaran digital seperti VA, QRIS, mbanking, merchant online, dsb



Tim Efektif mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi kebijakan pajak daerah sesuai UU HKPD terbaru

Pengembangan Kompetensi – Tim Efektif



Rapat-rapat koordinasi Tim Efektif dengan para unit kerja terkait

Hasil Rencana Pengembangan Potensi Diri

No	Hasil Rencana Pengembangan Potensi Diri
1	Meningkatnya kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kebutuhan atas pelayanan pajak daerah sebagai solusi untuk memecahkan persoalan panjangnya proses dan risiko yang ada selama ini.
2	Meningkatnya kemampuan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mensukseskan reformasi birokrasi melalui pendekatan pelayanan berbasis pada kemudahan dan kecanggihan teknologi.
3	Meningkatnya kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek perubahan yang disertai dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan baik internal dan eksternal dalam melaksanakan program kerja organisasi, semangat kolaborasi dan harmonisasi dengan perangkat organisasi lain.
4	Meningkatnya dan mendukung transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah sebagai bagian dalam menumbuhkan pelayanan berbasis digital yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kredibilitas kepada masyarakat khususnya wajib pajak dimana pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat, serta mengurangi biaya administrasi dan potensi kesalahan.



1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di era industri 4.0, pemerintah daerah menghadapi tantangan perubahan masyarakat dan perilaku yang dipicu oleh teknologi, yang mengharuskan penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik yang efisien serta transparan. Digital governance memerlukan kemampuan dalam tata kerja, manajemen talenta, dan penggunaan teknologi, dengan fokus pada kapabilitas, budaya anti-korupsi, kebijakan adaptif, dan sistem anggaran terintegrasi untuk mendukung flexible working dalam pelayanan publik.



3. Kepemimpinan Gigital

Kepemimpinan, terutama dalam era digital, melibatkan pemimpin yang memengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), lahir gaya kepemimpinan baru, yaitu e-leadership, yang memanfaatkan teknologi untuk menghadapi tantangan bisnis. Pemimpin digital harus memiliki karakteristik seperti visi inovatif, kemampuan berjejaring, mengatasi kompleksitas, serta bersikap terbuka dan transparan. Selain itu, mereka harus mampu memotivasi tim, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, beradaptasi dengan perubahan, dan terus belajar untuk mendukung transformasi digital dalam organisasi.

KETERKAITAN MATA PELATIHAN

2. Manajemen Keuangan Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pendanaan yang cukup. Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Kepala Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan harus mengikuti prinsip fiskal yang konsisten, efisiensi alokasi, dan efisiensi pelaksanaan. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Indonesia menerapkan sistem penganggaran seperti Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja, yang mengintegrasikan perencanaan, pengalokasian dana, dan pencapaian kinerja yang efisien.



PENUTUP

• *Kesimpulan*

Proyek perubahan "SIAP PAK" bertujuan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memberikan kemudahan pembayaran melalui Virtual Account secara kolektif. Proyek ini fokus pada kemudahan bagi perangkat desa dalam melakukan pembayaran PBB-P2, yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan capaian tahapan jangka pendek yang telah terlaksana, termasuk 11 milestones, proyek ini akan dilanjutkan pada tahapan jangka menengah dan panjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang, dengan arahan dan bimbingan dari Mentor pasca seminar.



• *Lesson Learned*

1. Meningkatnya kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pajak daerah untuk memecahkan masalah proses dan risiko yang ada.
2. Meningkatnya kemampuan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi.
3. Meningkatnya kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan pihak-pihak terkait dan melibatkan pemangku kepentingan untuk semangat kolaborasi dan harmonisasi.
4. Mendukung transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, akurasi, dan mengurangi biaya serta kesalahan administrasi.





TIM EFEKTIF

“ SIAP PAK ”



**PKN TK II ANGKATAN XXXVII
TAHUN 2024**